



KEPALA BAPEDALDA : 2013, Papua Barat "Provinsi Konservasi" Harus Tercapai

Salah satu Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat adalah menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai "Provinsi Konservasi". Sebagai tindak lanjutnya, Bapedalda Provinsi Papua Barat menargetkan tahun 2013, pencanangan Papua Barat sebagai "Provinsi Konservasi" sudah harus tercapai.

Merujuk pada visi misi Kepala Daerah Provinsi Papua Barat, juga telah mendapat apresiasi positif serta mendapat dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup Pusat. Visi misi itu disampaikan langsung Kepala Bapedalda Papua Barat, saat berlangsung Rakoreg LH Indonesia Timur wilayah V SUMAPAPUA awal April lalu di kota Nyiur Melambai Manado, Sulawesi Utara.

Kepala Bapedalda Provinsi Papua Barat, Ir. Jacob Manusawai, MH menuturkan, dalam program Provinsi Konservasi, hal mendasar yang melatarbelakanginya adalah permasalahan tata ruang wilayah. Penting diingat, tata ruang wilayah yang disusun Bappeda diharapkan tidak diganggu gugat, salah satu contohnya, permasalahan alih fungsi.

Guna menunjang program tersebut, Dosen Fahutan UNIPA ini mengemukakan, harus ditunjang dengan hadirnya Perangkat legislasi berupa Perda untuk memproteksi permasalahan lingkungan. Disarankan pula, agar setiap aktivitas infrastruktur di Papua Barat yang tertuang dalam dokumen tata ruang harus mengacu kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan alias AMDAL.

"AMDAL itu penting, karena didalamnya sudah menyangkut ijin pemakaian suatu wilayah berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat pemilik hak ulayat. Misalnya, alternatif lokasi untuk desain pelabuhan laut, lapangan terbang maupun desaan pendanaan," terang Bapak Manusawai.

Maksudnya, kajian AMDAL yang didalamnya tertuang dokumen tata ruang pembangunan wilayah, menjadi persyaratan penting yang diterapkan pemerintah provinsi kedepannya. Sehingga setiap bentuk bantuan yang akan dikucurkan pemerintah provinsi ke daerah kabupaten/kota harus mengacu pada kajian AMDAL-nya.

"AMDAL itu ibarat bumper utama, jika tidak memiliki kajian AMDAL, maka bantuan tidak perlu dikucurkan," ucap Tokoh Pejuang



Ir. Jacob Manusawai, MH

Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat.

Di sisi lain, Pejabat Provinsi yang dikenal akrab dengan insan pers ini menuturkan, persyaratan utama dari visi misi gubernur Papua Barat menjadikan Provinsi ini Provinsi Konservasi, maka perlu diperjuangkan Perda yang memuat Perdasi dan Perdasus untuk mengelola SDA. Alasannya, Papua Barat masuk dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otsus bagi Papua Barat. "Harus dipercepat hadirnya Perdasi dan Perdasus. Perlu transparansi kejelasan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pemerintah pusat sesuai aturan UU Otsus, yakni 70 : 30 Persen. Sebab kekuatan pembangunan ada pada dana bagi hasil dan dana Otsus," terangnya.

Namun, terdapat faktor yang mempengaruhi lambannya pencapaian program ini, salah satunya provinsi ini belum memiliki NSPK. Padahal, kata Manusawai, NSPK sebagai rambu-rambu yang harus mengacu pada petunjuk Gubernur dan Bupati/Walikota. Sementara lambannya kemitraan DPRD menindaklanjuti masalah lingkungan ikut berpengaruh terhadap pencapaian program.

Tak heran jika Kepala Bapedalda menyinggung, kesepakatan menjadi provinsi konservasi dikembalikan kepada masing-masing Tupoksi SKPD. Sebab, sejauh ini tingkat pencapaian pencanangan sebagai provinsi konservasi belum memihak, dan baru dijalankan Bapedalda selaku tupoksi. Lewat kajian lingkungan hidup strategi, diharapkan mendorong Papua Barat menjadi "Provinsi Konservasi".

■ Yolanda/Jusri